ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DALAM PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

¹Maya Tri Hastuti

²Irine Diana Sari Wijayanti

^{1,2}Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta

¹mayatri@gmail.com

²irine@amayogyakarta.ac.id

ABSTRACT

Dinsos P3A of Gunungkidul Regency, Special Region of Yogyakarta, plays a crucial role in the implementation of social welfare programs, particularly in women's empowerment, child protection, and poverty alleviation. Accurate and transparent financial reporting is key to ensuring program accountability and effectiveness. This study aims to analyze the implementation of an Accounting Information System (AIS) in the preparation of financial reports at the Social Service for Women's Empowerment and Child Protection (Dinsos P3A) of Gunungkidul Regency.

The method used was qualitative analysis using the Miles and Huberman model, which encompasses data collection, reduction, verification, and conclusion.

The results indicate that the AIS has improved efficiency, accuracy, and transparency in financial report preparation. However, there are challenges in technical understanding and IT infrastructure. Factors contributing to the success of AIS implementation include staff training and management support. Solutions to address these challenges include increased training, infrastructure improvements, and strengthening the monitoring and evaluation system. Optimal implementation of the AIS is expected to improve the quality of financial reporting at the Social Service for Women's Empowerment and Child Protection (Dinsos P3A) of Gunungkidul Regency.

Keywords: Accounting Information System, Preparation of Financial Reports,

PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat, termasuk dalam bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak. Dinas Sosial P3A memiliki peran penting dalam mela ksanakan program-program terkait. Dalam rangka mendukung akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan yang akurat dan relevan. Laporan keuangan ini menjadi dasar bagi pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja.

Dalam penyusunan laporan keuangan yang akurat dan relevan merupakan hal yang krusial bagi setiap organisasi, tak terkecuali instansi pemerintah seperti Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul. Laporan

keuangan yang baik mencerminkan kinerja keuangan organisasi, membantu dalam pengambilan keputusan, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. (Weygandt, 2020).

Dalam era digital saat ini, Sistem Informasi Akuntansi menjadi solusi penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyusunan laporan keuangan. SIA memungkinkan pengolahan data keuangan yang lebih cepat, akurat, dan terintegrasi. selain itu, SIA juga menyediakan informasi yang lebih komprehensif dan relevan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Menurut Weygandt, (2020), dalam laporan keuangan yang biasanya dilaporkan adalah:

1. LRA (Laporan Realisasi Anggaran)
2. Neraca
3. Laporan Operasional (LO)
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Hal di atas sesuai dengan ketentuan dalam PP 71 tahun 2010 dan senada dengan hasil penulisan dari Amelia dkk, (2023) dalam penelitian berjudul Analisis Penerapan Akuntansi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende, disampaikan bahwa dalam penyusunan laporan keuangan, penting dilakukan untuk melihat sesuai/sejalan atau tidak sesuai/sejalan dengan penerapan akuntansi PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Oleh karena itu menarik untuk mengkajinya dalam penelitian dengan judul “Analisis Sistem Informasi Akuntansi Dalam Penyusunan Pelaporan Keuangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui implementasi Sistem Informasi Akuntansi dalam penyusunan pelaporan keuangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi Sistem Informasi Akuntansi dalam Penyusunan Pelaporan Keuangan Dinas Sosial P3A Kabupaten Gunungkidul, untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi penggunaan Sistem Informasi Akuntansi dalam penyusunan pelaporan keuangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul dan untuk mengetahui solusi mengatai kendala-kendala dalam implementasi penggunaan SIA dalam penyusunan pelaporan keuangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul.

KAJIAN TEORI

1. Standar Akuntansi Pemerintah

a. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun (2010) pasal 1 ayat 3 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang di singkat SAP adalah, prinsip-prinsip akuntansi berbasis akrual yang di terapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. dapat disimpulkan bahwa SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan

hukum dalam upaya meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Indonesia.

Menurut Halim, (2014) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Sementara Menurut Mardiasmo, (2018) menyatakan Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan salah satu aspek penting yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas tata Kelola Keuangan Negara dan Pelaporan Keuangan Pemerintah. Tanpa adanya standar ini, maka laporan yang dihasilkan oleh Akuntansi Keuangan Daerah bisa jadi berbeda-beda di setiap daerah yang akan memunculkan persoalan baru di tingkat Nasional.

b. Tujuan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Menurut Mardiasmo, (2018) tujuan SAP adalah meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah. Sedangkan menurut Pramudiana (2017) tujuan standar akuntansi pemerintah berdasarkan penjelelasan dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun (2010) laporan keuangan yang di hasilkan dari penerapan SAP Berbasis AkruaI dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan tujuan yang di kemukakan diatas dapat di katakan bahwa tujuan SAP adalah pedoman dalam penyusunan laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah.

2. Laporan Keuangan

a. Definisi Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan daerah dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan PP No. 71 Tahun (2010). Berdasarkan Permendagri No.13 Tahun (2006) Laporan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Kesimpulannya, laporan keuangan merupakan output atau hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu laporan keuangan ini juga dapat menggambarkan indikasi kesuksesan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya

b. Komponen Laporan Keuangan SKPD

Komponen laporan keuangan daerah yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial. Berdasarkan (PP No.71 Tahun 2010) komponen laporan keuangan ada 5 yaitu:

1) LRA (Laporan Realisasi Anggaran)

LRA merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran menggunakan basis akuntansi kas dalam penyajiannya. Pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas. umum negara/daerah. Sedangkan belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah. Sisa lebih/kurang

pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL).

2) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

3) Laporan Operasional (LO)

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam LO terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan akun-akun luar biasa.

4) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang menghubungkan antara LO dengan neraca, sehingga penyusunan LO, LPE, dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

5) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terperinci nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE. Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali:

- a) Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum
- b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.

METODE PENULISAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penulisan kualitatif. Menurut Sugiyono (2022), penelitian kualitatif adalah metode penelitian untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induksi dan hasil penelitian lebih menekankan pada suatu makna. Metode penulisan yang digunakan adalah wawancara pada subjek penulisan, observasi dan dokumentasi.

2. Subjek dan Objek

Dalam penulisan ini yang menjadi subjek penulisan adalah 3 orang staf Perencanaan Keuangan di Dinsos P3A Kabupaten Gunungkidul yang bertanggung jawab dalam penyusunan anggaran program dan laporan keuangan di Dinsos P3A Kabupaten Gunungkidul. Objek penulisan adalah Analisis Sistem Informasi Akuntansi Dalam Penyusunan Pelaporan Keuangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul.

3. Metode Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (2014) yang menyatakan bahwa, aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Tahapan analisis data menurut

Milles dan Huberman (2014) yaitu Pengumpulan data (*data display*), Reduksi data (*data reduction*), Verifikasi data/interpretasi data dan Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*)

PEMBAHASAN

1. Implementasi Sistem Informasi Akuntansi dalam penyusunan pelaporan keuangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul

Implementasi Sistem Informasi Akuntansi dalam penyusunan pelaporan keuangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, secara umum terdapat 3 aplikasi yang digunakan yaitu:

a. Sistem Informasi Aset

Sistem yang digunakan oleh Dinsos P3A Kabupaten Gunungkidul untuk mengelola dan memantau aset yang dimiliki, baik aset tetap (seperti bangunan, kendaraan, dan peralatan) maupun aset bergerak (seperti inventaris kantor). Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset, serta memudahkan pelaporan dan monitoring aset. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset, serta memudahkan pelaporan dan monitoring aset.

b. Sistem Informasi Persediaan

Sistem Informasi Persediaan (SIP) pada Dinsos P3A Kabupaten Gunungkidul adalah sistem yang digunakan untuk mengelola dan memantau persediaan barang-barang yang dibutuhkan untuk kegiatan Dinsos P3A Kabupaten Gunungkidul, seperti bantuan sosial, kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan lainnya. SIP ini membantu Dinsos P3A Kabupaten Gunungkidul untuk mengetahui persediaan barang yang tersedia, memprediksi kebutuhan persediaan di masa depan, dan mengoptimalkan proses pengadaan dan distribusi persediaan.

c. Penggunaan aplikasi penatausahaan yaitu SIPAK dan SIPD untuk tahun 2025.

Penggunaan SIPAK (Sistem Informasi Keuangan Daerah) dan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) Dinsos P3A Kabupaten Gunungkidul adalah untuk mengelola keuangan dan aset secara lebih efisien dan transparan. SIPAK digunakan untuk pencatatan keuangan dan aset, sedangkan SIPD digunakan untuk mengelola informasi pemerintahan secara terpusat. Dengan menggunakan SIPAK dan SIPD, pemerintah daerah, termasuk Dinas Sosial P3A Kabupaten Gunungkidul, dapat mengelola keuangan dan aset secara lebih efisien, transparan, dan akuntabel. SIPD juga membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik, karena data yang terpusat dan terintegrasi dapat digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan.

Gabungan aplikasi tersebut di harapkan mampu menghasilkan kualitas laporan keuangan yang bagus sesuai Permendagri Nomor 70 Tahun 2019. Oleh karenanya penggunaan sistem di atas di dukung dengan pelatihan atau sosialisasi dari pihak terkait misalnya Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) mendapat undangan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dan kantor Pelayanan pajak pratama. Dinas Sosial P3A Kabupaten Gunungkidul kemungkinan membentuk tim yang terdiri dari perwakilan dari bagian keuangan, bidang teknis terkait misalnya (bidang yang menangani data penerima bantuan), dan mungkin melibatkan ahli IT atau konsultan eksternal, Tim akan menganalisis sistem pelaporan keuangan yang berjalan saat ini.

Ini mencakup identifikasi kelemahan, inefisiensi, dan kebutuhan informasi yang belum terpenuhi.

Keterlibatan aktif dari staf Dinas Sosial P3A Kabupaten Gunungkidul yang akan menggunakan sistem (terutama dari bagian keuangan dan bidang terkait) dalam setiap tahapan implementasi (perencanaan, desain, pengujian, pelatihan) akan meningkatkan rasa kepemilikan dan memastikan sistem sesuai dengan kebutuhan mereka. Budaya organisasi yang terbuka terhadap perubahan, inovasi, dan pembelajaran akan mempermudah adopsi sistem baru. Resistensi terhadap perubahan perlu diidentifikasi dan dikelola dengan baik.

Implementasi Sistem Informasi Akuntansi sangat penting dalam penyusunan laporan keuangan di Dinas Sosial P3A Kabupaten Gunungkidul. Sistem Informasi Akuntansi membantu menyederhanakan proses akuntansi, meningkatkan akurasi data, dan mempercepat penyusunan laporan keuangan, sehingga memungkinkan Dinas Sosial P3A Kabupaten Gunungkidul untuk memiliki informasi keuangan yang akurat dan tepat waktu, yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Sistem Informasi Akuntansi juga membantu meningkatkan efisiensi bisnis dan memberikan informasi yang relevan bagi Dinas Sosial P3A Kabupaten Gunungkidul.

Berikut adalah beberapa bentuk laporan yang diimplementasikan Sistem Informasi Akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan Dinas Sosial P3A Kabupaten Gunungkidul:

a. LRA (Laporan Realisasi Anggaran)

LRA merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Dinas sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis akuntansi kas dalam penyajiannya.

Pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum negara/daerah, sedangkan belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL).

LRA berisi informasi tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Pendapatan:

Penerimaan yang diperoleh Dinas Sosial P3A Kabupaten Gunungkidul, termasuk pendapatan asli daerah (PAD) dan transfer dari pemerintah pusat atau daerah lain.

2) Belanja:

Pengeluaran yang dilakukan Dinsos P3A Kabupaten Gunungkidul untuk menjalankan program dan kegiatan, termasuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

3) Pembiayaan:

Aktivitas yang dilakukan untuk membiayai defisit anggaran, seperti penerbitan obligasi atau pinjaman.

LRA Dinsos P3A Kabupaten Gunungkidul memiliki beberapa kegunaan, antara lain:

- 1) Evaluasi kinerja keuangan:
LRA dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan Dinsos P3A Kabupaten Gunungkidul dalam mencapai target anggaran.
- 2) Pengambilan keputusan:
LRA dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan terkait anggaran di masa depan.
- 3) Transparansi anggaran:
LRA memberikan informasi yang transparan tentang penggunaan anggaran Dinsos P3A Kabupaten Gunungkidul kepada publik.

b. Neraca

Laporan neraca Dinsos P3A Kabupaten Gunungkidul berisi informasi tentang kondisi keuangan Dinsos P3A Kabupaten Gunungkidul, termasuk aset (misalnya, uang kas, bangunan, peralatan, aset lainnya), kewajiban (misalnya, utang kepada pihak ketiga), dan ekuitas (misalnya, modal Dinsos).

Laporan ini menunjukkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas (modal) Dinsos P3A Kabupaten Gunungkidul pada suatu periode waktu tertentu. Laporan neraca ini biasanya digunakan untuk memberikan gambaran tentang kondisi keuangan Dinsos P3A Kabupaten Gunungkidul dan membantu dalam perencanaan dan pengambilan keputusan keuangan.

Fungsi Laporan Neraca Dinsos P3A Kabupaten Gunungkidul:

- 1) Memantau Kondisi Keuangan:
Laporan neraca membantu Dinsos P3A Kabupaten Gunungkidul untuk memantau kondisi keuangan mereka secara berkala, termasuk aset yang dimiliki, kewajiban yang harus dibayarkan, dan kondisi keuangan secara keseluruhan.
- 2) Perencanaan Keuangan:
Informasi dari laporan neraca dapat digunakan untuk membuat perencanaan keuangan yang lebih baik, misalnya dalam mengalokasikan anggaran, mengelola aset, atau mengelola kewajiban.
- 3) Pengambilan Keputusan:
Laporan neraca juga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan keuangan, misalnya dalam menentukan apakah Dinsos P3A Kabupaten Gunungkidul memiliki cukup aset untuk menjalankan program atau proyek tertentu.

c. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) Dinsos P3A Kabupaten Gunungkidul adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai kegiatan operasional keuangan Dinsos P3A Kabupaten Gunungkidul, termasuk pendapatan, beban, dan surplus/defisit operasional. Laporan ini juga membandingkan kinerja keuangan dengan periode sebelumnya.

Laporan ini biasanya mencakup data seperti pendapatan dari berbagai sumber, biaya operasional, dan surplus atau defisit operasional. LO Dinas Sosial P3A Kabupaten Gunungkidul memiliki tujuan penting, yaitu:

- 1) Menunjukkan Kinerja Operasional
LO memberikan gambaran tentang bagaimana Dinas Sosial P3A Kabupaten Gunungkidul menjalankan kegiatan operasionalnya dan hasilnya secara keuangan.

- 2) Membandingkan Kinerja
Dengan membandingkan LO dengan periode sebelumnya, dapat dilihat apakah Dinas Sosial P3A Kabupaten Gunungkidul mengalami peningkatan atau penurunan kinerja.
- 3) Pertanggungjawaban Keuangan
LO menjadi bagian dari pertanggungjawaban keuangan Dinas Sosial P3A Kabupaten Gunungkidul terhadap penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan perubahan ekuitas (LPE) merupakan laporan yang menghubungkan antara LO dengan neraca, sehingga penyusunan LO, LPE, dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan perubahan ekuitas (LPE) Dinsos P3A Kabupaten Gunungkidul adalah bagian dari laporan keuangan yang menunjukkan perubahan pada ekuitas atau modal Dinas Sosial P3A Kabupaten Gunungkidul selama satu periode tertentu. LPE menjelaskan bagaimana ekuitas Dinas Sosial P3A Kabupaten Gunungkidul berubah dari ekuitas awal, melalui surplus atau defisit, koreksi, dan berakhir pada ekuitas akhir.

LPE bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat tentang perubahan ekuitas Dinas Sosial P3A Kabupaten Gunungkidul, sehingga pemangku kepentingan dapat memahami bagaimana kekayaan dinas sosial berubah dari waktu ke waktu, dengan komponen LPE terdiri dari:

- 1) Ekuitas Awal: Nilai ekuitas di awal periode.
- 2) Surplus/Defisit LO: Perubahan ekuitas akibat kegiatan operasional (laba/rugi) yang dilaporkan dalam Laporan Operasional.
- 3) Koreksi pada Ekuitas: Perubahan ekuitas akibat koreksi kesalahan atau perubahan kebijakan akuntansi.
- 4) Ekuitas Akhir: Nilai ekuitas di akhir periode setelah mempertimbangkan perubahan yang terjadi selama periode tersebut.

e. Catatan Laporan Atas Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terperinci nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE. Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali:

- 1) Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.

2. Faktor-Faktor yang Mendukung Keberhasilan Implementasi Sistem Informasi Akuntansi dalam Penyusunan Pelaporan Keuangan Dinas Sosial P3A Kabupaten Gunungkidul

Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 orang narasumber mengenai faktor-faktor yang mendukung keberhasilan implementasi Sistem Informasi Akuntansi dalam penyusunan pelaporan keuangan Dinas Sosial P3A Kabupaten Gunungkidul, adalah:

- a. Dukungan penuh dari kepala dinas dan jajaran pimpinan
Dukungan ini meliputi alokasi sumber daya yang memadai (anggaran, personel), keterlibatan aktif dalam proses implementasi, dan komunikasi yang jelas mengenai pentingnya sistem baru.
- b. Kompetensi SDM
Pegawai yang kompeten dalam pengelolaan keuangan dan pemahaman sistem informasi akuntansi sangat penting. Dinas perlu memastikan pegawai memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk mengoperasikan dan memanfaatkan sistem SIA dengan efektif.
- c. Pemanfaatan TI
Teknologi informasi seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan internet harus dimanfaatkan secara optimal. Sistem SIA yang baik akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pelaporan keuangan.
- d. Penerapan SPIP
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif akan mengurangi risiko kesalahan atau kecurangan dalam pengelolaan keuangan. Implementasi SIA harus didukung oleh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang kuat untuk memastikan integritas pelaporan keuangan.
- e. SAKD
Surat Keputusan Akhir Dinas (SAKD) merupakan standar yang harus diikuti dalam penyusunan pelaporan keuangan daerah. Implementasi SIA harus selaras dengan Surat Keputusan Akhir Dinas (SAKD) agar pelaporan keuangan Dinas Sosial P3A sesuai dengan regulasi yang berlaku.

3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi dan penggunaan Sistem Informasi Akuntansi dalam penyusunan pelaporan keuangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul.

Disampaikan narasumber bahwa kendala dalam implementasi dan penggunaan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam penyusunan pelaporan keuangan meliputi:

- a. Keterlambatan dalam Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan
Salah satu kendala utama adalah keterlambatan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan secara tepat waktu. Hal ini dapat disebabkan oleh:
 - 1) Proses input data yang masih lambat karena untuk dapat menghasilkan suatu laporan yang bagus dan akuntabel memerlukan waktu yang lebih lama
 - 2) Kurangnya pemahaman beberapa SDM terhadap prosedur penggunaan SIA.
 - 3) Ketidakterpaduan sistem antara unit kerja yang membuat konsolidasi laporan memakan waktu lama.
- b. Kurangnya Pengawasan dan Pengendalian dalam Pengelolaan Keuangan
dimana SIA seharusnya mendukung fungsi pengawasan dan pengendalian internal, namun sering kali sistem ini tidak dimanfaatkan secara optimal karena:
 - 1) Pegawai yang bertugas dalam fungsi pengawasan belum memanfaatkan data dari SIA secara maksimal.
 - 2) Minimnya review atas transaksi yang tercatat dalam sistem.
- c. Keterlambatan dalam Penyampaian Laporan Keuangan

Meskipun laporan keuangan telah disusun, penyampaian ke pihak berwenang (misalnya BPK, BPKP, atau Kementerian Sosial) sering mengalami keterlambatan karena:

- 1) Kurangnya koordinasi antarbagian yang menangani pelaporan.
 - 2) Kendala teknis seperti error pada sistem atau gangguan jaringan.
- d. Dapat mengakibatkan turunnya Kualitas Pelayanan Publik
- Implementasi SIA seharusnya turut mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui transparansi dan akuntabilitas keuangan, namun, dalam praktiknya:
- 1) Laporan keuangan yang lambat dan tidak akurat menyebabkan keterlambatan dalam realisasi program sosial.
 - 2) Masyarakat tidak mendapatkan informasi anggaran secara terbuka karena sistem tidak didesain untuk keterbukaan informasi.
 - 3) Pengambilan keputusan atas bantuan sosial menjadi tidak efisien karena data tidak real-time.

4. Solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi kendala-kendala dalam implementasi Sistem Informasi Akuntansi dalam penyusunan pelaporan keuangan Dinas Sosial P3A Kabupaten Gunungkidul

Narasumber menyampaikan solusi untuk mengatasi kendala dalam implementasi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) untuk penyusunan pelaporan keuangan Dinsos P3A Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:

- a. Mengatasi Keterlambatan dalam Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, solusinya dengan:
 - 1) Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkala mengenai penggunaan aplikasi SIA, pencatatan transaksi, dan pelaporan.
 - 2) Digitalisasi alur kerja keuangan secara menyeluruh, sehingga proses pencatatan, validasi, dan pelaporan dapat dilakukan secara otomatis.
 - 3) Penetapan SOP (Standard Operating Procedure) dan jadwal pelaporan yang terintegrasi dalam sistem, agar setiap unit tahu batas waktu pelaporan.
- b. Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan, solusinya dengan:
 - 1) Mengoptimalkan tim pengawasan internal atau unit pengendali internal yang secara rutin mengaudit penggunaan sistem dan transaksi keuangan.
 - 2) Mengoptimalkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk monitoring dan evaluasi berkala terhadap sistem dan penggunaannya, serta tindak lanjut jika ditemukan ketidaksesuaian.
- c. Mengatasi Keterlambatan dalam Penyampaian Laporan Keuangan, solusinya dengan:
 - 1) Menerapkan sistem pelaporan bertingkat dan real-time, sehingga laporan dari unit bawah langsung tersimpan dan bisa dipantau oleh level atas.
 - 2) Peningkatan infrastruktur jaringan dan server, agar tidak mengalami kendala teknis saat pelaporan.
- d. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, solusinya dengan:

- 1) Mengintegrasikan data keuangan dengan program layanan sosial, sehingga pemanfaatan anggaran bisa langsung mendukung pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Menggunakan SIA sebagai dasar dalam pengambilan keputusan berbasis data, agar bantuan sosial lebih tepat sasaran dan cepat direalisasikan.
- 3) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan menyajikan laporan keuangan atau ringkasan anggaran yang bisa diakses publik melalui website Dinas Sosial P3A Kabupaten Gunungkidul.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan maka penulis memberikan kesimpulan bahwa:

1. Implementasi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) untuk penyusunan pelaporan keuangan Dinsos P3A Kabupaten Gunungkidul berbentuk laporan LRA (Laporan Realisasi Anggaran), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan sesuai dengan ketentuan dalam PP 71 tahun 2010.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sistem informasi akuntansi dalam penyusunan pelaporan keuangan Dinas Sosial P3A Kabupaten Gunungkidul adalah (1) dukungan penuh dari kepala dinas dan jajaran pimpinan, (2) Pegawai yang kompeten dalam pengelolaan keuangan dan pemahaman sistem informasi akuntansi, (3) Teknologi informasi seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan internet harus dimanfaatkan secara optimal, (4) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), (5) Surat Keputusan Akhir Dinas (SAKD) diikuti dalam penyusunan pelaporan keuangan daerah. Implementasi SIA harus selaras dengan Surat Keputusan Akhir Dinas (SAKD) agar pelaporan keuangan Dinas Sosial P3A sesuai dengan regulasi yang berlaku.
3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses implementasi SIA dalam penyusunan pelaporan keuangan Dinas Sosial P3A Kabupaten Gunungkidul adalah keterlambatan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan, kurangnya pengawasan dan pengendalian dalam Pengelolaan Keuangan, keterlambatan dalam penyampaian Laporan Keuangan, Dapat mengakibatkan turunnya kualitas Pelayanan Publik.
4. Solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi kendala-kendala dalam proses implementasi SIA dalam penyusunan pelaporan keuangan Dinas Sosial P3A
5. Kabupaten Gunungkidul adalah (1) mengatasi keterlambatan dalam Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan dengan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkala, digitalisasi alur kerja keuangan secara menyeluruh, penetapan SOP (Standard Operating Procedure) dan jadwal pelaporan yang terintegrasi dalam sistem, agar setiap unit tahu batas waktu pelaporan, (2) meningkatkan pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Keuangan, solusinya dengan pengoptimalkan tim pengawasan internal atau unit pengendali internal yang secara rutin mengaudit penggunaan sistem dan transaksi keuangan, mengoptimalkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), (3) mengatasi keterlambatan dalam Penyampaian Laporan Keuangan, solusinya dengan menerapkan sistem pelaporan bertingkat dan real-time, peningkatan infrastruktur jaringan dan server, agar tidak mengalami kendala teknis saat pelaporan, (4) meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, solusinya dengan mengintegrasikan data keuangan dengan program layanan sosial, menggunakan SIA sebagai dasar dalam pengambilan keputusan berbasis data, agar bantuan sosial lebih

tepat sasaran dan cepat direalisasikan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan menyajikan laporan keuangan atau ringkasan anggaran yang bisa diakses publik melalui website Dinas Sosial P3A Kabupaten Gunungkidul.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai Analisis Sistem Informasi Akuntansi dalam penyusunan pelaporan keuangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul, maka penulis dapat memberikan saran meliputi :

1. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul perlu memperkuat komitmen dan dukungan dari pimpinan, khususnya Kepala Dinas dan jajaran pimpinan lainnya. Dukungan ini tidak hanya dalam bentuk alokasi anggaran dan sumber daya, tetapi juga dalam memberikan prioritas terhadap pelaksanaan SIA, mengingat pentingnya kualitas laporan keuangan dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas.
2. Melakukan pelatihan berkala yang lebih intensif bagi seluruh pegawai terkait penggunaan SIA, terutama dalam aspek pencatatan transaksi dan penyusunan laporan. Pelatihan harus mencakup teknik penggunaan sistem yang efektif serta pemahaman terkait pengelolaan keuangan yang baik.
3. Melakukan pemeliharaan dan pembaruan sistem SIA secara berkala. Pastikan bahwa sistem selalu dalam kondisi optimal dan kompatibel dengan teknologi terbaru. Penyempurnaan sistem secara terus-menerus akan mengurangi risiko kesalahan teknis yang bisa menghambat pelaporan keuangan.
4. Mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pengendalian dalam penggunaan SIA, dengan memastikan bahwa sistem pengendalian internal (SPIP) berjalan dengan baik. Pembentukan tim pengawasan yang terlatih dan memastikan penggunaan data keuangan yang tercatat dalam SIA secara maksimal dapat memperkecil potensi kesalahan atau kecurangan dalam pengelolaan keuangan.
5. Meningkatkan infrastruktur jaringan dan server yang digunakan untuk mengakses SIA. Koneksi internet yang cepat dan stabil, serta perangkat keras yang memadai, akan mempercepat proses input dan pengolahan data keuangan.
6. Terapkan sistem pelaporan yang memungkinkan pengumpulan dan pengolahan data keuangan secara bertahap dan real-time. Setiap unit kerja dapat langsung mengirimkan laporan mereka, yang kemudian akan dipantau oleh unit pengelola untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data.

REFERENSI

- Ahmad, Amelia. "Analisis Penerapan Akuntansi dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende." *Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kupang* 10.1 (2023): 68-85.
- Arikunto, S. (2018). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Revisi ed.). Jakarta: Rineka Cipta.

- Fitrie, S. (2008). *Pengelolaan Keuangan Daerah Perspektif Permendagri No. 13 Tahun 2006 pada Pemerintah Kota Binjai* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Halim, A. (2014). *Teori, konsep, dan aplikasi akuntansi sektor publik: Dari anggaran hingga laporan keuangan, dari pemerintah hingga tempat ibadah* (Edisi ke-2). Salemba Empat.
- Hashimov, Elmar. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook and The Coding Manual for Qualitative Researchers*: Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña. Thousand Oaks, CA: SAGE, 2014. 381 pp. Johnny Saldaña. Thousand Oaks, CA: SAGE, 2013. 303 pp. 2015.
- Indonesia, Presiden Republik. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan." Jakarta (ID): Sekretariat Negara (2010).
- Lestari, Widya, et al. Analisis Sistem Informasi Akuntansi dalam Penyusunan Laporan Keuangan PT WYCA Dengan Metoda PIECES. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 2023, 12.2: 153-164.
- Mukaddas, Al. Studi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Perspektif Permendagri no. 13 tahun 2006 Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. *Journal of Innovation in Business and Economics*, 2013, 4.2: 131-150.
- Niu, F. A. L., Karamoy, H., & Tangkuman, S. (2014). Analisis Penerapan Pp. No. 71 Tahun 2010 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota
- Kotamobagu. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(4).
- Pramudiana, A. (2017). *Tujuan Standar Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Sako, U., & Lantowa, F. D. (2018). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pada pemerintah Kabupaten Gorontalo. *Journal of Accounting Science*, 2(1), 43-54.
- Sampel, Indra Franselski, Lintje Kalangi, and Treesje Runtu. "Analisis Kesiapan Pemerintah Kota Manado dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Mengenai Standar Akuntansi Basis Akrual." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 3.1 (2015).
- Utari, Rini; Harahap, Junita Putri Rajana. Analisis Sistem Informasi Akuntansi dalam Meningkatkan Efisiensi Pelaporan Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 2024, 2.4: 362-376.